



*Pemerintah  
Kabupaten Lima Puluh Kota*

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2020**



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana atas berkat rahmat dan hidayahNya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dibuat berdasarkan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan dari Pembuatan Laporan ini adalah untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2019. Selanjutnya, dalam melaksanakan kegiatan tersebut ditemui hambatan dan kendala, namun hambatan dan kendala tersebut bukan menjadi suatu halangan akan tetapi dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan perbandingan serta tolak ukur bagi Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas kedepan nantinya.

Akhir kata dalam pembuatan Laporan ini, kami telah berupaya mengerjakan sebaik mungkin, namun disadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya.

Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami perlukan. Atas masukannya, diucapkan terima kasih.

Payakumbuh, Januari 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

  
**HERMAN AZMAR, AP, M.Si**  
**NIP. 19730913 199311 1 001**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Stabilitas keamanan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2019 secara umum dapat dikatakan kondusif. Demikian juga halnya dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berjalan dengan sukses dan lancar, hal ini dapat dilihat dengan naiknya persentase partisipasi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menjadi 80,90%. Pencapaian partisipasi melebihi target nasional sebanyak 77%. Konflik yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama Tahun 2019 dapat difasilitasi penyelesaiannya, sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap jalannya roda pembangunan maupun pemerintahan. Demikian juga halnya dalam memperkuat ketahanan nasional yaitu dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan telah dilaksanakan peringatan hari bela Negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri merupakan upaya memberdayakan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga memungkinkan terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota sejahtera dan dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa. Hal tersebut merupakan hak setiap masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, tetapi usaha untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sejahtera dan dinamis “Yang Mantap” berlandaskan Iman dan Taqwa memerlukan kerja sama yang baik dan dinamis dari semua elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas dari lingkungan terkecil sampai lingkungan yang terbesar.

Guna mewujudkan harapan stakeholder maupun masyarakat tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dan kegiatan Tahun 2019 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan setiap tahunnya yang secara rinci akan dijabarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, telah didukung anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019, yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 sebesar Rp. 4.662.510.892,- (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Anggaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.410.487.332,-(Dua Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 2.252.023.560,-(Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini disusun, untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	: PENDAHULUAN .....	1
	A. LATAR BELAKANG .....	1
	B. TUGAS DAN WEWENANG.....	2
	C. SUMBER DAYA MANUSIA/PERSONIL.....	7
	D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI .....	8
	E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	11
BAB II	: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	12
	A. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	12
	B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .....	15
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
	A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	19
	B. HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	20
	C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA.....	22
	D. ANALISIS EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN.....	43
	E. REALISASI ANGGARAN.....	46
BAB IV	: PENUTUP.....	49
	A. KESIMPULAN.....	49
	B. LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG.....	49

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	8
Tabel 2.1	IKU Kesbangpol.....	16
Tabel 3.1	Klasifikasi penilaian.....	19
Tabel 3.2	Hasil pengukuran kinerja.....	20
Tabel 3.3	Capaian kinerja sasaran strategis 1.....	23
Tabel 3.4	Capaian kinerja sasaran strategis 2.....	31
Tabel 3.5	Capaian kinerja sasaran strategis 3.....	37
Tabel 3.6	Realisasi fisik dan keuangan Tahun 2019.....	43
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	6
Gambar 3.1	Peringatan Peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam.....	24
Gambar 3.2	Peringatan Peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam.....	25
Gambar 3.3	Peringatan peristiwa Situjuah.....	25
Gambar 3.4	Peringatan peristiwa Situjuah.....	26
Gambar 3.5	Peringatan peristiwa Koto Tuo Lautan Api.....	26
Gambar 3.6	Peringatan peristiwa Koto Tuo Lautan Api.....	27
Gambar 3.7	Peringatan Peristiwa Perundingan Antara Pemberi Mandat dengan Pemimpin PDRI.....	27
Gambar 3.8	Peringatan Peristiwa Perundingan Antara Pemberi Mandat dengan Pemimpin PDRI.....	28
Gambar 3.9	Peringatan Hari Bela Negara.....	28
Gambar 3.10	Peringatan Hari Bela Negara.....	29
Gambar 3.11	Peringatan peristiwa pengumuman kabinet PDRI.....	29
Gambar 3.12	Peringatan peristiwa pengumuman kabinet PDRI.....	30
Gambar 3.13	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan MinumanKeras dan Narkoba di Kecamatan Harau.....	34
Gambar 3.14	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan MinumanKeras dan Narkoba di Kecamatan Harau.....	35
Gambar 3.15	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan MinumanKeras dan Narkoba di Kecamatan Guguak.....	35
Gambar 3.16	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan MinumanKeras dan Narkoba di Kecamatan Guguak.....	36
Gambar 3.17	Penyuluhan Politik bagi pelajar SLTA se-Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 26 dan 27 Februari 2019.....	38
Gambar 3.18	Penyuluhan Politik bagi pelajar SLTA se-Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 26 dan 27 Februari 2019.....	39
Gambar 3.19	Penyuluhan Politik bagi pelajar SLTA se-Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 26 dan 27 Februari 2019.....	39
Gambar 3.20	Penyuluhan Politik bagi pelajar SLTA se-Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 5 dan 6 Maret 2019.....	40

Gambar 3.21	Penyuluhan Politik bagi pelajar SLTA se-Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 5 dan 6 Maret 2019.....	40
Gambar 3.22	Sosialisasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati bagi organisasi masyarakat, organisasi wanita dan organisasi profesi se-Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 10 Desember 2019.....	41
Gambar 3.23	Sosialisasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati bagi organisasi masyarakat, organisasi wanita dan organisasi profesi se-Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 10 Desember 2019.....	41
Gambar 3.24	Sosialisasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati bagi Pelajar SLTA se-Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 11 Desember 2019.....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government, sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi//Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu indikator kinerja Utama, RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- d. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun berikutnya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

- a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **B. TUGAS DAN WEWENANG**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Sedangkan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan IV Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten.
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi Negara, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten.
- e. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.

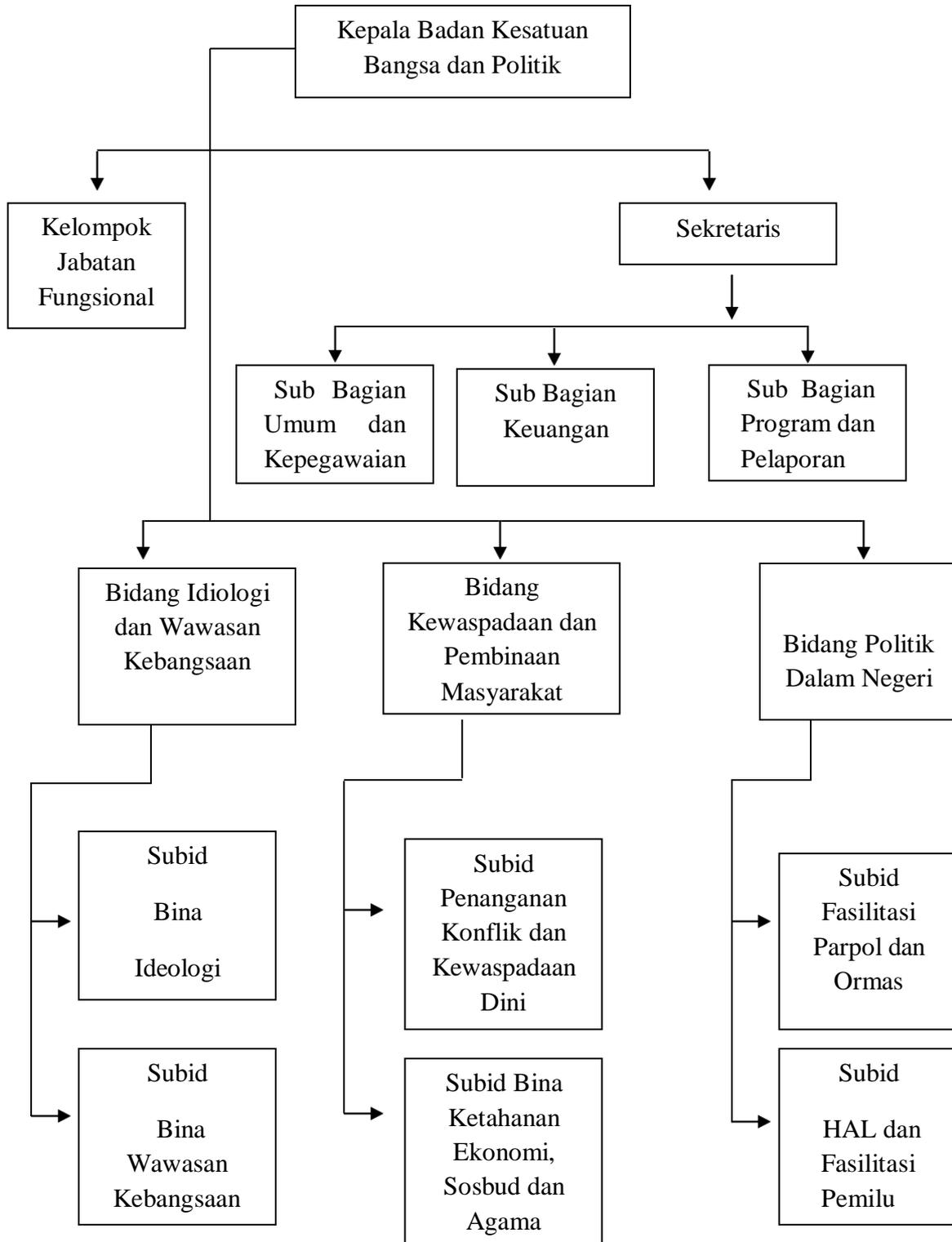
- g. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tata kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
- h. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kebijakan umum nasional, dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- i. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.
- j. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- k. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- l. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

- m. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
- n. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis Provinsi) sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- o. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- p. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
- q. Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



### C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) / PERSONIL

Data Tahun 2019 menunjukkan jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, 26 (dua puluh enam) PNS, 1 (satu) PTT dan 5 (lima) THL, yang terdiri dari:

- a. Jabatan Struktural Eselon II.b sebanyak 1 (satu) orang,
- b. Jabatan Struktural Eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang,
- c. Jabatan Struktural Eselon III.b sebanyak 3 (tiga) orang,
- d. Jabatan Struktural eselon IV.a sebanyak 8 (delapan) orang,
- e. Staf sebanyak 13 (tiga belas) orang,
- f. Pegawai Tidak Tetap sebanyak 1 (satu) orang, dan
- g. Tenaga Harian Lepas sebanyak 5 (lima) orang.

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	5	1	-	7
3.	Bidang Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	1	4	-	-	5
4.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	-	5	1	-	6
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	2	3	2	-	7
	Jumlah	5	17	4	-	26

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIP III	SLTA/ SMK	SLTP	SD	
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	6	-	1	-	-	7
3.	Bidang Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	-	4	-	1	-	-	5
4.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	-	3	1	1	1	-	6
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	-	5	-	2	-	-	7
6.	Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	1	-	-	1
7.	Tenaga Harian Lepas	-	1	-	4	-	-	5
	Jumlah	1	19		10	1		32

#### **D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Secara umum beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hingga saat ini belum jelas (diatur dalam ketentuan peralihan) sehingga kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota belum terukur secara jelas.
- b. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- c. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas perkantoran.
- d. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relative masih terbatas, dan adanya tumpang tindih program/kegiatan dengan OPD lainnya.
- e. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.

Sedangkan identifikasi permasalahan setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan pada bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :
  1. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
  2. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
  3. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
  4. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
  5. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.

6. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
  7. Belum terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Permasalahan pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat :
1. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
  2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak social politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat.
  3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat dalam mengantisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.
  4. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
  5. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan diri.
  6. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.
- c. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri :
1. Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
  2. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
  3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan Orkemas.
  4. Belum terhimpun seluruh data Orkemas dan Partai Politik, di Kabupaten Lima Puluh Kota
  5. Kurangnya kesadaran pengurus Partai Politik penerima bantuan keuangan Partai Politik dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana bantuan

keuangan Partai Politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Belum maksimal pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap:
  - a. Pelaksanaan Pemilu (Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah)
  - b. Situasi Politik lainnya (Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, disharmonisasi antara kepala daerah dan DPRD, unjuk rasa).
  - c. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 ini terdiri dari beberapa Bab, sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Manusia/Personil, Isu Strategis/Permasalahan Utama Yang Dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan sistematika penulisan.
- II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yang memuat Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- III. Akuntabilitas Kinerja, yang memuat Metodologi Pengukuran capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran dan Realisasi Anggaran.
- IV. Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Datang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota, visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa** . Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 disusun untuk menunjang misi 1, yang diwujudkan dalam sejumlah program dan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Disamping untuk menunjang misi 1, rencana strategis Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menunjang misi 4, yang diwujudkan dalam program-program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota, maka tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :
  - a. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.
  - b. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - c. Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis.
  - d. Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
  - b. Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
  - c. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - d. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjalankan kebijakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peringatan Peristiwa Bela Negara di 7 Titik peringatan.
2. Melakukan Bimbingan Teknis dan diskusi tentang 4 Pilar kebangsaan.
3. Melakukan sosialisasi tentang ideologi dan wawasan kebangsaan.
4. Menyelenggarakan forum-forum komunikasi di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Memberikan penyuluhan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, bundo kanduang terkait pencegahan penanggulangan penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba dan minuman keras.
6. Menyelenggarakan penyuluhan politik kepada masyarakat.
7. Melakukan monitoring perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Meningkatkan pengelolaan kepegawaian ( penempatan dan pengembangan karir aparatur ).
9. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur.
10. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis kinerja.
11. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
12. Mengikutsertakan aparatur pada pelatihan intelijen dan pengadaan barang dan jasa.
13. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun strategi yang diambil untuk menjalankan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperingati Peristiwa Bela Negara dan rangkaian peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 4 Pilar kebangsaan.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ideologi dan wawasan kebangsaan.
4. Meningkatkan koordinasi terkait isu-isu strategis di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Meningkatkan pengetahuan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, bundo kanduang dalam pencegahan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan minuman keras.
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi.
7. Mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis.
8. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur.
9. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif , efisien dan akuntabel.
10. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur.
11. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
12. Meningkatkan kompetensi aparatur.
13. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 46/BKBP-LK/2018 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2016-2021

Tabel 2.1  
IKU Kesbangpol

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	$\frac{\text{Jumlah Hari Besar Nasional yang diperingati}}{\text{Jumlah Hari Besar Nasional yang harus diperingati}} \times 100 \%$	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi penyelesaian Konflik Sosial pada tahun } n}{\text{Jumlah fasilitasi penyelesaian Konflik Sosial pada tahun } n} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian	Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat
		Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	$\frac{\text{Jumlah pengguna tahun } n - \text{Jumlah Pengguna tahun } n-1}{\text{Jumlah pengguna tahun } n-1} \times 100 \%$	BNN Kota Payakumbuh, Kepolisian	
3.	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pileg}}{\text{Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pileg}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pilpres}}{\text{Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pilpres}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan Pemilukada}}{\text{Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada}} \times 100 \%$	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Bidang Politik Dalam Negeri

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, berikut ini disampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dan evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2019. Berikut ini adalah Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat, dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional.
2. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - b. Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras.
3. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada.

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

### KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	Persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional	100%
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	95%
		Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	6%
3.	Meningkatnya kualitas demokrasi di kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada	75%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	121.619.690,-
2.	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	688.280.940,-
3.	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	28.685.290,-
4.	Pendidikan Politik Masyarakat	216.370.000,-
	TOTAL	1.054.955.920,-

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk pengukuran kinerja digunakan metode pengukuran yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Kualifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91% - 100%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

## B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	Persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	95%	100%	105,2%	Sangat Tinggi
		Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	-6%	+4,34%	72,33%	Sedang
3.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada	75%	80,90%	107,86%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator kinerja					96,34%	Sangat Tinggi

Dari tabel hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 diatas dapat kita simpulkan bahwa klaifikasi penilaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalahh 96,34% dengan predikat tinggi.

Dalam rangka pemenuhan rekomendasi APIP ( Aparat Pengawas Internal Pemerintah ) sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Nomor 700/33/INSP-LK/LHE/EV/VI/2019 tanggal 11 Juni Tahun 2019, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

#### A. Perencanaan Kinerja

1. Akan ditindaklanjuti reuiu terhadap dokumen renstra secara berkala untuk mencapai tujuan organisasi yang selaras dan relevan dengan RPJM, dan tujuan yang ditetapkan telah disertai dengan ukuran keberhasilan (indikator) .
2. Akan disusun rencana aksi atas kinerja yang mencantumkan target secara periodik atas kinerja dan mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja. Selanjutnya rencana aksi tersebut akan dimonitor secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

#### B. Pengukuran Kinerja

1. IKU telah dipublikasikan di web badan KesbangPol.
2. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi akan dilakukan secara bulanan/triwulan/semester dan pengukuran kinerja atas rencana aksi akan digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
3. Pengukuran kinerja akan dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi.
4. Akan memanfaatkan IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, dan akan dilaksanakan monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan IV dan hasil pengukurannya akan digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

### C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja akan memuat analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Informasi dalam laporan kinerja akan digunakan sepenuhnya dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/ kegiatan organisasi dan untuk peningkatan kinerja secara maksimal.

### D. Evaluasi Internal

1. Akan dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Akan dilaksanakan pemantauan atas rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja, sehingga memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan dan diharapkan hasil rencana aksi menunjukkan perbaikan setiap periode serta menindaklanjutinya dalam bentuk langkah-langkah nyata.

### E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Akan lebih ditingkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, dan akan membuat inovasi dalam manajemen kinerja.

### F. Rekomendasi Tahun Lalu Yang Belum ditindaklanjuti

Tidak ada rekomendasi tahun lalu yang belum ditindaklanjuti oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu berusaha memenuhi rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

# 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1	Persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional		7 titik	7 titik	80%	100%	100%	100%	

Dalam rangka menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditingkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kalangan Masyarakat. Pengaruh globalisasi dan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap wawasan kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat bela negara di masyarakat. Dewasa ini pada masyarakat kita terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Makin mudarnya rasa berbangsa dan bernegara.
- b. Makin menurunnya moral generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- d. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan Bangsa.
- e. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral Bangsa.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kalangan Masyarakat telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang

bertujuan untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Diskusi Pemantapan 4 Pilar, Bimbingan Teknis Pemantapan Nilai-nilai Bela Negara dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pencapaian target kinerja pada Tahun 2019 adalah persentase pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional di 7 (tujuh) titik Peringatan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- a. Peringatan Peristiwa Gugurnya 9 (Sembilan ) Syuhada (BNPK) di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang tanggal 10 Januari 1949, yang diperingati di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Tanggal 10 Januari 2019.

Gambar 3.1

Peringatan peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam



Gambar 3.2

Peringatan peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam



- b. Peringatan Peristiwa Penyerangan Para Pemimpin PDRI oleh Belanda dan Kaki Tangannya di Wilayah Situjuh Batua ( Peristiwa Situjuh) tanggal 15 Januari 1949, yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari pada tanggal 15 Januari 2019.

Gambar 3.3

Peringatan Peristiwa Situjuh



Gambar 3.4

Peringatan Peristiwa Situjuah



- c. Peringatan Peristiwa Koto Tuo Lautan Api tanggal 10 Juni 1949, yang dilaksanakan di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau pada tanggal 10 Juni 2019.

Gambar 3.5

Peringatan Peristiwa Koto Tuo Lautan Api



Gambar 3.6  
Peringatan Peristiwa Koto Tuo Lautan Api



- d. Peringatan Peristiwa Perundingan Antara utusan Pemberi Mandat/Pemerintahan RI dengan Pemimpin PDRI di Padang Jampang tanggal 6 Juli 1949, dan Peringatan Peristiwa Rapat Umum Pimpinan PDRI dengan Masyarakat di Koto Kaciak tanggal 7 Juli 1949 yang dilaksanakan di Kecamatan Guguk tanggal 30 Juli 2019.

Gambar 3.7  
Peringatan Peristiwa Perundingan Antara Pemberi Mandat dengan Pemimpin PDRI



Gambar 3.8  
Peringatan Peristiwa Perundingan Antara Pemberi Mandat dengan Pemimpin PDRI



- e. Peringatan Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang Menuju Koto Tinggi Tanggal 19 Desember 1948, yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 2018 sebagai Peringatan Hari Bela Negara.

Gambar 3.9  
Peringatan Hari Bela Negara



Gambar 3.10  
Peringatan Hari Bela Negara



- f. Peringatan Peristiwa Pengumuman Kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tanggal 22 Desember 1948, yang dilaksanakan di Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Gambar 3.11  
Peringatan Peristiwa Pengumuman Kabinet PDRI



Gambar 3.12  
Peringatan Peristiwa Pengumuman Kabinet PDRI



#### Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

- Tingginya partisipasi masyarakat dalam rangka peringatan peristiwa sejarah dalam rangka hari bela Negara yang dilaksanakana di 7(tujuh) titik Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.

#### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

#### Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari, Tokoh Masyarakat yang ada didaerah dan

instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.

## **2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya keamanan , ketertiban dan kenyamanan masyarakat**

Tabel 3.4  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota		3 kali	1 kali	51%	100%	95%	100%	
2	Persentasi Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman Keras		10%	9,38%	-7%	+30,43%	-6%	+4,34%	

Keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan stabilitas politik dalam negara serta persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Tanpa stabilitas politik dalam negeri serta persatuan dan kesatuan bangsa akan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Konflik sosial adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu sangatlah penting dilaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di tengah

masyarakat, karena apabila tidak diselesaikan akan dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang akan menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan politik, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan.

Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintesis, maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebagaimana kita ketahui dampak penggunaan narkoba sangat berbahaya karena daya rusaknya sangat mengerikan. Dewasa ini peredaran dan penggunaan narkoba dan minuman keras di Indonesia sangat memprihatinkan, seperti yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional bahwa setiap 25 menit meninggal seorang pengguna narkoba. Untuk itu perlu dilaksanakan penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Pada saat ini dana untuk penyuluhan sangat terbatas, sementara peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meluas, semua cara digunakan oleh pengedar narkoba untuk memasok narkoba kepada generasi muda.

### **Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sebagai berikut :

- a. Demo tenaga sukarela Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota supaya diangkat menjadi Tenaga Harian Lepas, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota akan mencarikan solusi terbaik bagi tenaga sukarela Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut.
- b. Konflik antara Wali Nagari Sungai Talang, dengan BAMUS Nagari dan masyarakat Sungai Talang yang menginginkan agar Wali Nagari mundur, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat ini Wali Nagari Sungai Talang telah melaksanakan tugasnya/masuk kantor kembali.

- c. Konflik antara masyarakat Jorong Banjar Ronah, Nagari Pangkalan dengan PT. SRI terkait masalah harga daun gambir dan pembuangan limbah pengolahan gambir oleh PT. SRI, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Polres Lima Puluh Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan saat ini PT. SRI telah beroperasi kembali seperti biasa.

#### Analisis Penyebab Keberhasilan dan kegagalan

- Fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berhasil dengan baik karena adanya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, aparatur pemerintahan Kecamatan , Nagari ,dan Wali Jorong.

#### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

#### Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Nagari dan Jorong, dan instansi

terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.

### **Persentase Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman Keras.**

Pada Tahun 2019 Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras ditargetkan menurun 6% dari Tahun 2018, tapi tidak tercapai, karena terjadi peningkatan kasus penggunaan narkoba dan minuman keras di tahun 2018 yaitu dari 46 kasus dan di Tahun 2019 menjadi 48 kasus, dimana terjadi peningkatan jumlah kasus pengguna narkoba dan minuman keras sebesar 4,34%. Dalam rangka penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan/penggunaan minuman keras dan narkoba.

Gambar 3.13  
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di Kecamatan Harau



Gambar 3.14  
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di  
Kecamatan Harau



Gambar 3.15  
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di  
Kecamatan Guguk



Gambar 3.16  
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba di  
Kecamatan Guguk



#### Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

- Penurunan persentase jumlah pengguna narkoba dan minuman keras tidak dapat tercapai karena beberapa faktor diantaranya adalah :
  1. Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.
  2. Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.
  3. Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum optimalnya pengawasan.
  4. Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.
  5. Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba dan minuman keras.

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

### Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Polres Kabupaten Lima Puluh Kota, Polres Payakumbuh, BNN Kota Payakumbuh, Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.

### **3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Tabel 3.5  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada		-	-	-	-	75%	80,90%	

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang

akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya Pemerintahan.

Partisipasi politik merupakan sikap masyarakat dalam menentukan pilihan dan arah menuju perubahan yang lebih baik kedepannya. Salah satu indikator keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti tahapan-tahapan Pemilu. Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan wakil Presiden Tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dilaksanakan pada Tahun 2018 di 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan pada Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 telah dilaksanakan penyuluhan kepada pemilih pemula dan organisasi kemasyarakatan.

Gambar 3.17

Penyuluhan Politik Bagi Pelajar SLTA se-Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 26 dan 27 Februari 2019



Gambar 3.18  
Penyuluhan Politik Bagi Pelajar SLTA se-Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 26 dan 27 Februari 2019



Gambar 3.19  
Penyuluhan Politik Bagi Pelajar SLTA se-Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 26 dan 27 Februari 2019



Gambar 3.20  
Penyuluhan Politik Bagi Pelajar SLTA Se-Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 5 dan 6 Maret 2019



Gambar 3.21  
Penyuluhan Politik Bagi Pelajar SLTA Se-Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 5 dan 6 Maret 2019



Gambar 3.22

Sosialisasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi se-Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 10 Desember 2019



Gambar 3.23

Sosialisasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi se-Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 10 Desember 2019



Gambar 3.24  
Sosialisasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bagi Pelajar SLTA se-Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 11 Desember 2019



#### Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

- Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pileg dan Pilpres tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
  - Kandidat yang mungkin lebih menarik dan berkampanye atraktif,
  - Pemilih yang merasa terwakili, baik secara politik maupun programatik,
  - Kontestasi yang ketat,
  - Gencarnya pemberitaan media mengenai pemilu Tahun 2019,
  - Sosialisasi yang maksimal dari KPU
- Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan jajarannya, Badan Pengawas Pemilu kabupaten Lima Puluh Kota dan jajarannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga kegiatan berjalan lancar.

### Analisis Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pendidikan, Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari, Tokoh Masyarakat yang ada di daerah dan instansi terkait lainnya sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera dapat diatasi.

### **D. ANALISIS EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019, jumlah anggaran belanja langsung adalah Rp. 2.252.023.560, dengan realisasi keuangan Rp. 2.036.530.453 ( 90,43 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

Adapun realisasi fisik dan keuangan tiap programnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Ket
			Keuangan (Rp.)	(%)	Fisik (%)	
<b>I.</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>467.942.440,-</b>	<b>448.130.820,-</b>	<b>95,77%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,-	3.000.000,-	100%	100%	Kurang efisien
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	27.469.440,-	26.509.678,-	96,51%	100%	efisien
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	161.490.000,-	160.106.000,-	99,14%	100%	efisien

4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27.567.500,-	26.577.780,-	96,41%	100%	efisien
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.380.000,-	25.419.000,-	99,99%	100%	efisien
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.206.000,-	16.407.500,-	73,89%	100%	efisien
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.250.000,-	5.249.000,-	99,98%	100%	efisien
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	27.500.000,-	17.902.000,-	65,10%	100%	efisien
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	167.079.500,-	166.959.862,-	99,93%	100%	efisien

<b>II.</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>190.268.580,-</b>	<b>178.080.802,-</b>	<b>93,59%</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	77.910.000,-	74.167.400,-	95,20%	100%	efisien
2.	Pengadaan Mebeleur	8.000.000,-	7.000.000,-	87,50%	100%	efisien
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000,-	4.997.000,-	99,94%	100%	efisien
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	91.608.580,-	85.326.402,-	93,14%	100%	efisien
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.750.000,-	6.590.000,-	85,03%	100%	efisien

<b>III.</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>16.500.000,-</b>	<b>16.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Kurang efisien</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	16.500.000,-	16.500.000,-	100%	100%	Kurang efisien

<b>IV.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>62.225.000,-</b>	<b>34.117.790,-</b>	<b>54,83%</b>	<b>100%</b>	<b>efisien</b>
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	44.000.000,-	24.425.790,-	55,51%	100%	efisien
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	18.225.000,-	9.692.000,-	53,18%	100%	efisien

<b>V.</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>41.350.000,-</b>	<b>39.512.000,-</b>	<b>95,56%</b>	<b>100%</b>	<b>efisien</b>
-----------	---	---------------------	---------------------	---------------	-------------	----------------

1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.350.000,-	39.512.000,-	95,56%	100%	efisien
----	--	--------------	--------------	--------	------	---------

<b>VI.</b>	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>228.332.560,-</b>	<b>192.489.800,-</b>	<b>84,30%</b>	<b>100%</b>	<b>efisien</b>
1.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	74.735.000,-	69.785.000,-	93,38%	100%	efisien
2.	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	54.230.800,-	49.724.300,-	91,69%	100%	efisien
3.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	46.884.690,-	21.215.000,-	45,25%	100%	efisien
4.	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	52.482.070,-	51.765.500,-	98,63%	100%	efisien

<b>VII.</b>	<b>Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>781.645.940,-</b>	<b>717.990.341,-</b>	<b>91,86%</b>	<b>100%</b>	<b>efisien</b>
1.	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	421.688.200,-	394.241.841,-	93,49%	100%	efisien
2.	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	64.965.000,-	64.302.500,-	98,98%	100%	efisien
3.	Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	160.000.000,-	149.661.000,-	93,54%	100%	efisien
4.	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	134.992.740,-	109.785.000,-	81,33%	100%	efisien

<b>VIII.</b>	<b>Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>28.685.290,-</b>	<b>13.485.900,-</b>	<b>47,01%</b>	<b>100%</b>	<b>efisien</b>
1.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	28.685.290,-	13.485.900,-	47,01%	100%	efisien

<b>IX</b>	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>435.073.750,-</b>	<b>396.223.000,-</b>	<b>91,07%</b>	<b>100%</b>	<b>efisien</b>
1.	Penyuluhan Kepada Masyarakat	220.429.250,-	198.894.000,-	97,36%	100%	efisien
2.	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	0,-	0	0	0	-

3.	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	113.838.500,-	107.740.000,-	94,64%	100%	efisien
4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100.806.000,-	89.589.000,-	88,87%	100%	efisien
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.252.023.560,</b>	<b>2.036.630.453-</b>	<b>90,43%</b>	<b>100%</b>	<b>efisien</b>

## E. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Realisasi Anggaran Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	DPA (Rp)	DPPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentas e	Ket
<b>I.</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>596.131.020,-</b>	<b>467.942.440,-</b>	<b>448.130.820,-</b>	<b>95,77%</b>	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.200.000,-	3.000.000,-	3.000.000,-	100%	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	34.800.000,-	27.469.440,-	26.509.678,-	96,51%	
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	181.400.000,-	161.490.000,-	160.106.000,-	99,14%	
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.487.500,-	27.567.500,-	26.577.780,-	96,41%	
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	62.380.000,-	26.380.000,-	25.419.000,-	99,99%	
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	82.420.000,-	22.206.000,-	16.407.500,-	73,89%	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.250.000,-	5.250.000,-	5.249.000,-	99,98%	
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	72.000.000,-	27.500.000,-	17.902.000,-	65,10%	
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	122.193.520,-	167.079.500,-	166.959.862,-	99,93%	
<b>II.</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>114.400.000,-</b>	<b>190.268.580,-</b>	<b>178.080.802,-</b>	<b>93,59%</b>	
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14.000.000,-	77.910.000,-	74.167.400,-	95,20%	

2.	Pengadaan Mebeleur	8.000.000,-	8.000.000,-	7.000.000,-	87,50%	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000,-	4.997.000,-	99,94%	
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	79.650.000,-	91.608.580,-	85.326.402,-	93,14%	
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.750.000,-	7.750.000,-	6.590.000,-	85,03%	

<b>III.</b>	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>17.500.000,-</b>	<b>16.500.000,-</b>	<b>16.500.000</b>	<b>100%</b>	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	17.500.000,-	16.500.000,-	16.500.000,-	100%	

<b>IV.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>53.225.000,-</b>	<b>62.225.000,-</b>	<b>34.117.790,-</b>	<b>54,83%</b>	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.000.000,-	44.000.000,-	24.425.790,-	55,51%	
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	18.225.000,-	18.225.000,-	9.692.000,-	53,18%	

<b>V.</b>	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>26.557.000,-</b>	<b>41.350.000,-</b>	<b>39.512.000,-</b>	<b>95,56%</b>	
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.557.000,-	41.350.000,-	39.512.000,-	95,56%	

<b>VI.</b>	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>211.345.060,-</b>	<b>228.332.560,-</b>	<b>192.489.800,-</b>	<b>84,30%</b>	
1.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	74.735.000,-	74.735.000,-	69.785.000,-	93,38%	
2.	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	36.309.800,-	54.230.800,-	49.724.300,-	91,69%	
3.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	46.884.690,-	46.884.690,-	21.215.000,-	45,25%	

4.	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	53.415.570,-	52.482.070,-	51.765.500,-	98,63%	
<b>VII.</b>	<b>Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>770.233.440,-</b>	<b>781.645.940,-</b>	<b>717.990.341,-</b>	<b>91.86%</b>	
1.	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	393.288.200,-	421.688.200,-	394.241.841,-	93,49%	
2.	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	81.952.500,-	64.965.000,-	64.302.500,-	98,98%	
3.	Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	160.000.000,-	160.000.000,-	149.661.000,-	93,54%	
4.	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	134.992.740,-	134.992.740,-	109.785.000,-	81,33%	
<b>VIII.</b>	<b>Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>28.685.290,-</b>	<b>28.685.290,-</b>	<b>13.485.900,-</b>	<b>47,01%</b>	
1.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	28.685.290,-	28.685.290,-	13.485.900,-	47,01%	
<b>IX</b>	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>337.003.750,-</b>	<b>435.073.750,-</b>	<b>396.223.000,-</b>	<b>91.07%</b>	
1.	Penyuluhan Kepada Masyarakat	115.864.000,-	220.429.250,-	198.894.000,-	97,36%	
2.	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	6.945.250,-	0,-	0	0	
3.	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	113.688.500,-	113.838.500,-	107.740.000,-	94,64%	
4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100.506.000,-	100.806.000,-	89.589.000,-	88,87%	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.148.993.560</b>	<b>2.252.023.560,-</b>	<b>2.036.630.453-</b>	<b>90,43%</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggaraan pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu bekerjasama dengan instansi terkait dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari Instansi Vertikal seperti Polres, Kodim, Kemenag, Kejaksaan, Kantor Imigrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan pengawas Pemilu Kabupaten Lima Puluh Kota, dan lain-lain maupun dukungan dari instansi lainnya (Badan, Setwan, Dinas, Bagian, Kecamatan dan Nagari).

Mengingat dana yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sangat terbatas, walaupun oleh Kementerian Dalam Negeri sudah harus dilaksanakan oleh daerah, tapi sampai saat ini kegiatan tersebut belum bias dilaksanakan. Kegiatan tersebut adalah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

#### **B. LANGKAH PENINGKATAN DI MASA DATANG**

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa yang akan datang, maka diharapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlunya staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan, baik oleh Pemerintah, maupun lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas dari kompetensi dari staf, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Perlunya tambahan kendaraan dinas/operasional untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, karena pada saat ini kendaraan dinas roda empat sangat terbatas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

- sedangkan hal ini sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan di Nagari dan Kecamatan.
- c. Perlunya dukungan dana yang layak untuk melaksanakan program dan kegiatan yang belum terlaksana, terutama kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
  - d. Perlunya tambahan personil yang mempunyai keahlian khusus (keahlian pengadaan barang dan jasa, akuntansi), sehingga tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat terlaksana dengan baik.

Payakumbuh, Januari 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

  
**HERMAN AZMAR, AP, M.Si**  
**NIP. 19730913 199311 1 001**



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMAN AZMAR, AP, M. Si  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : IRFENDI ARBI  
Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

IRFENDI ARBI

Payakumbuh, Januari 2019

PIHAK PERTAMA

HERMAN AZMAR, AP, M. Si  
Pembina TK.I (IV.b) / NIP.  
197309131993111001

**PERJANJIAN KINERJA**

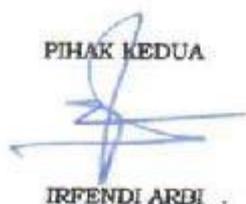
**SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**TAHUN ANGGARAN : 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	1. Persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional	100%
2	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	2. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota	95%
		3. Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	6%
3.	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pilg, Pilpres dan Pemilu Kada	75%

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	121.619.690
2	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	688.280.940
3	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	28.685.290
4	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	216.370.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.054.955.920</b>

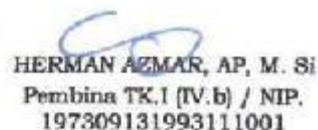
Payakumbuh, Januari 2019

PIHAK KEDUA



IRFENDI ARDI

PIHAK PERTAMA



HERMAN AZMAR, AP, M. Si  
 Pembina TK.I (IV.b) / NIP.  
 197309131993111001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat	1. Persentase pelaksanaan peringatan hari besar nasional	100%
2	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota 2. Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	95% 6%
3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pileg, Pilpres dan Pemilu Kada	75%

Payakumbuh, Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HERMAN AZMAR, AP. M. SI

Pembina TK.I (IV.b) / NIP. 19730913.199311.1.001







NO	INDIKATOR	INDIKATOR BERGUNA	TARIKAT	KELOMPOK BAHU	WISATA 1 (10000)	WISATA 2 (10000)	WISATA 3 (10000)	WISATA 4 (10000)	WISATA 5 (10000)	WISATA 6 (10000)	WISATA 7 (10000)	WISATA 8 (10000)
1	Menyusun dan melaksanakan program kerja yang terdapat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja
2	Menyusun dan melaksanakan program kerja yang terdapat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja	1. Menentukan Perencanaan Jadwal Kegiatan dan Kegiatan Kerja

